

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**ANALISIS BEBAN KERJA SATPOL PP KELURAHAN
BIDARA CINA**

Disusun Oleh :

Nama : Adela Dwi Mardini

NPM : 1733000180

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

**PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023



ANALISIS BEBAN KERJA SATPOL PP KELURAHAN BIDARA CINA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan Oleh**

**NAMA : ADELA DWI MARDINI
NPM : 1733000180
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : MSDMA**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

NAMA : ADELA DWI MARDINI
NPM : 1733000180
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : MSDMA
JUDUL : ANALISIS BEBAN KERJA SATPOL PP
KELURAHAN BIDARA CINA

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada Juli 2023

Pembimbing,



(Saut Gracer Sijabat, S.Psi, M.M)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta Pada Juli 2023

Ketua Merangkap Anggota



(Porman Lumban Gaol, S.Si, M.M)

Sekretaris Merangkap Anggota

A blue ink signature in cursive script, reading "Rimayku".

(Rima Ranintya Yusuf, S.I.P, M.P.A)

Anggota

A blue ink signature in cursive script, reading "Saut Gracer Sijabat".

(Saut Gracer Sijabat, S.Psi, M.M)

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH
(PAKTA INTEGRITAS)**

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : Adela Dwi Mardini
NPM : 1733000180
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul “**Analisis Beban Kerja Satpol PP Kelurahan Bidara Cina**” merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulis Tugas Akhir ini merupakan hasil Plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksa.

Jakarta, Juli 2023

Penulis,



Adela Dwi Mardini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul "**Analisis Beban Kerja Satpol PP Kelurahan Bidara Cina**" dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan Diploma Empat Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, keluasaan waktu serta berbagai anugerah lainnya.
2. Suami dan anak – anak yang dengan tulus memberikan doa dan motivasi.
3. Almarhum kedua orang tua (aba dan mama) yang tidak sempat melihat langsung anaknya menjadi sarjana sesuai keinginan mereka.
4. Bapak Saut Gracer Sijabat, S.Psi, M.M selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan terbaik.
5. Jajaran unsur Kelurahan Bidara Cina yang telah memberikan dukungan dalam penelitian.
6. Seluruh PNS dan PJLP di Kantor Kelurahan Bidara Cina terimakasih atas dukungan, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan.

Penulisan memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat mahasiswa harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, Juli 2023

Mahasiswa,



Adela Dwi Mardini

NPM. 1733000180

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji menganalisis beban kerja Satpol PP Kelurahan Bidara Cina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara dengan jenis penelitian kualitatif, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dengan teknik pengambilan data klafikasi data. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas untuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan Gubernur serta pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah. Wilayah Kelurahan Bidara Cina adalah salah satu kelurahan yang mempunyai permasalahan ketertiban umum dan sosial yang beragam, mulai dari masalah konflik internal warga, premanisme, pedagang kaki lima (PKL), penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), hingga penanggulangan bencana yang sering terjadi yakni banjir. Anggota Satpol PP Kelurahan Bidara Cina yang berjumlah 8 orang dituntut mampu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), selain itu Satpol PP Kelurahan Bidara Cina secara langsung atau tidak langsung melaksanakan tugas, perintah, penanganan laporan masyarakat, dan berkoordinasi dengan RT, RW, LMK dan unsur Kelurahan Bidara Cina dalam permasalahan kewilayahan. Analisi Beban kerja yang diemban petugas Satpol PP Kelurahan Bidara Cina, dinilai melampau atau melebihi beban kerja yang seharusnya dijalani masing – masing personil. Faktor yang mempengaruhi beban kerja yaitu faktor eksternal meliputi tugas – tugas, organisasi, dan lingkungan kerja, sedangkan faktor internal yakni faktor somatic dan faktor psikis. Analisis beban kerja tersebut didapat dari keterangan narasumber, observasi langsung oleh peneliti, dan hasil perhitungan analisis beban kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RBRI) Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Kata kunci : Analisis Beban kerja, Formasi Pegawai, Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRACT

The purpose of this study is to test the workload of Satpol PP Kelurahan Bidara Cina. The method used in this study is a survey method with a qualitative type of research, the population in this study is employees with data classification data collection techniques. The Civil Service Police Unit (Satpol PP) has the task of maintaining peace, public order, enforcing regional regulations and Governor's regulations as well as supervising the community to comply and obey regional regulations. The Bidara Cina Village area is one of the villages that has various general and social problems, ranging from problems of internal conflicts of residents, thuggery, street vendors (PKL), people with social welfare problems (PMKS), to disaster management that often occurs, namely floods. Members of Satpol PP Kelurahan Bidara Cina totaling 8 people are required to be able to carry out the main duties and functions (tupoksi), in addition to Satpol PP Kelurahan Bidara Cina directly or indirectly carry out duties, orders, handling community reports, and coordinating with RT, RW, LMK and elements of Bidara Cina Village in regional matters. Analysis The workload carried by Satpol PP officers of Bidara Cina Village, is considered to exceed or exceed the workload that should be carried out by each personnel. Factors that affect workload are external factors including tasks, organization, and work environment, while internal factors are somatic factors and psychic factors. The workload analysis is obtained from the information of the resource persons, direct observations by researchers, and the results of workload analysis calculations in accordance with the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia (Permenpan RBRI) Number 1 of 2020 concerning guidelines for job analysis and workload analysis.

Keywords : Workload Analysis, Employee Formation, Civil Service Police Unit

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Tinjauan Kebijakan dan Teori..... | 13 |
| C. Konsep Kunci | 36 |
| D. Kerangka Berpikir | 37 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 40 |
| A. Metode Penelitian | 40 |
| B. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| C. Instrumen Penelitian | 46 |
| D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data..... | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 51 |
| A. Penyajian Data..... | 51 |
| 1. Visi dan Misi Satpol PP | 52 |
| 2. Struktur Organisasi Satpol PP | 53 |
| 3. Deskripsi Jabatan | 54 |
| 4. Gambaran Umum Narasumber | 55 |

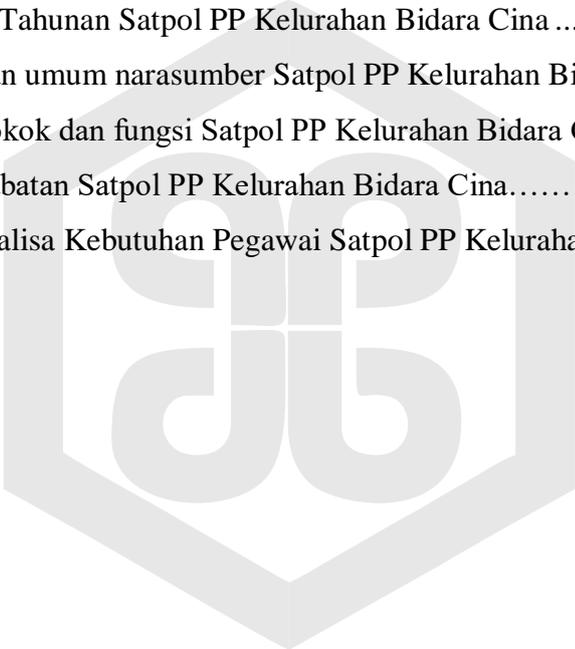
| | |
|------------------------------------|-----------|
| B. Pembahasan | 56 |
| C. Sintesis Pemecahan Masalah..... | 79 |
| BAB V PENUTUP | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

| Judul Tabel | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Laporan Tahunan Satpol PP Kelurahan Bidara Cina | 6 |
| Tabel 4.1 Gambaran umum narasumber Satpol PP Kelurahan Bidara Cina..... | 56 |
| Tabel 4.2 Tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kelurahan Bidara Cina..... | 57 |
| Tabel 4.3 Syarat Jabatan Satpol PP Kelurahan Bidara Cina..... | 62 |
| Tabel 4.4 Hasil Analisa Kebutuhan Pegawai Satpol PP Kelurahan Bidara Cina.. | 76 |



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DAFTAR GAMBAR

| Judul Gambar | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 Konsep Kunci | 36 |
| Gambar 2.2 Kerangka Berfikir | 37 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kelurahan Bidara Cina..... | 53 |



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini menjadi tolak ukur bagi Provinsi lain di Indonesia, kedudukannya sebagai ibukota negara, membuat Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dituntut dan tertantang dalam mewujudkan kota impian bagi semua kalangan. Kota yang aman, tertib, tentram, bersih dan nyaman menjadi dambaan setiap warga Jakarta, berbagai kebijakan dan kegiatan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban umum menjadi kendala utama permasalahan yang ada di DKI Jakarta, kesemrawutan tatanan masyarakat yang ditimbulkan oleh sekelompok masyarakat yang belum tertib dan melakukan pelanggaran semerta – merta mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat lainnya dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Sebagaimana dikemukakan Chazawi (2013) bahwa perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dalam undang-undang perbuatan itu sebagai perbuatan yang membahayakan, maka akibat perbuatan tersebut yang harus diterima adalah pemberlakuan sanksi hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan hukum tersebut Chazawi (2013).

Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini meliputi kegiatan deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Dalam

kegiatan penertiban masyarakat, kita mengenal kehadiran Satpol PP dan polisi sekilas mereka terlihat mempunyai tugas dan wewenang yang sama, padahal kedua instansi ini jauh berbeda. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 5 dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas :

- a. Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan wewenang Satpol PP yakni :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

Sedangkan Polisi adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas polisi sebagaimana tercantum dalam undang - undang tersebut yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, yang didalamnya mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menjadi urusan wajib kewenangan Pemerintah DKI Jakarta dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan dan perundang – undangan.

Kelurahan Bidara Cina menjadi salah satu bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta, terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, dengan jumlah rt/rw pada Januari 2022 sebanyak 188 RT dan 16 RW dan luas 126,3 km². Kantor Kelurahan Bidara Cina beralamat di Jl. Tanjung Lengkong no. 30 Rt. 004 Rw. 007, dengan jumlah penduduk di Kelurahan Bidara Cina sampai dengan bulan April 2022 adalah sebanyak 45.076 WNI dan 3 WNA, terdiri dari jumlah laki-

laki sebanyak 22.610 dan jumlah wanita sebanyak 22.462, tingkat kepadatan rata-rata penduduk 34.472 jiwa/km² dengan tingkat pertumbuhan penduduk bertambah dengan rata-rata sebesar 10% pertahun selama periode 2022.

Wilayah Kelurahan Bidara Cina tak luput dari permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pelanggaran Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum juga kerap terdapat di Kelurahan Bidara Cina mulai dari membangun tempat tinggal / usaha dibantaran sungai, membangun usaha atau bertempat tinggal dikolong jembatan / pinggir rel kereta api / jalur hijau, pengemis, pengamen, pedagang asongan, manusia *silver*, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tugas diantaranya memelihara serta menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan menegakan perda, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yaitu aparaturnya yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan perda, dan keputusan daerah. Bahkan pada pasal 3 aturan ini, Satpol PP diberi kewenangan menertibkan dan menindak warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman, melakukan pemeriksaan serta diperbolehkan mengambil tindakan represif non – yustisial dengan tetap mengedepankan keadilan dan pendekatan humanis.

Satpol PP Kelurahan Bidara Cina mempunyai tugas dan fungsi yang berdasarkan Pergub No. 285 Tahun 2016, yaitu :

- a. Melaksanakan SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan kegiatan pemantauan situasi ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan ketaatan terhadap perda dan pergub di tingkat kelurahan;
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketenteraman masyarakat, ketertiban umum dan ketaatan terhadap perda dan pergub di tingkat kelurahan;
- d. Melaksanakan operasi penertiban dan penegakan perda dan pergub di tingkat kelurahan;
- e. Membantu PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran perda dan pergub untuk diajukan ke pengadilan;
- f. Melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan / atau kemitraan dengan UKPD dan atau instansi pemerintah / swasta lainnya terkait kegiatan operasi penertiban dan penegakan perda dan pergub di tingkat kelurahan;
- g. Melaksanakan inventarisasi tempat rawan gangguan sosial dan pelanggaran perda dan pergub di tingkat kelurahan;
- h. Membantu melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada tempat rawan gangguan sosial dan pelanggaran perda dan pergub di tingkat kelurahan;

- i. Membantu PPNS dalam memproses dan menyusun pemberkasan pelanggaran tempat usaha terhadap pelanggaran perda dan pergub di tingkat kelurahan;
- j. Mengusulkan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Pergub kepada kasatpol PP kecamatan; dan
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas satpol PP kelurahan.

Pelanggaran ketertiban umum di wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam 3 (tiga) tahun terakhir selalu bertambah, data tersebut didapat dari laporan tahunan Satpol PP Kelurahan Bidara Cina, sebagai berikut :

Tabel 1.0.1

Laporan Tahunan Satpol PP Kelurahan Bidara Cina

| No | Pelanggaran | 2020 | 2021 | 2021 |
|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Pedagang kaki lima (PKL) | 2.880 | 3.918 | 4.025 |
| 2 | Pengamen | 2.160 | 2.367 | 2.561 |
| 3 | Manusia <i>silver</i> | 1.440 | 1.671 | 1.893 |
| 4 | Pengemis | 1.800 | 1.924 | 2.087 |
| 5 | Pedagang asongan | 1.389 | 1.753 | 1.943 |
| 6 | Pak ogah | 1.218 | 1.398 | 1.586 |
| 7 | Bangunan bantaran kali | 24 | 38 | 46 |
| 8 | Anak <i>Punk</i> | 48 | 57 | 65 |
| 9 | Penjual minuman beralkohol | 24 | 41 | 55 |

| | | | | |
|----|---------------|----|----|----|
| 10 | Bangunan liar | 36 | 49 | 57 |
|----|---------------|----|----|----|

Sumber : laporan tahunan Satpol PP Kelurahan Bidara Cina (2020 – 2022)

Satpol PP Kelurahan Bidara Cina saat ini berjumlah 8 (delapan) orang (data anggota Satpol PP Kelurahan Bidara Cina, 2020), dengan uraian sebagai berikut : 1 orang Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Satpol PP, 2 orang anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang anggota Pegawai Tidak Tetap (PTT), 3 orang Pegawai jasa lainnya perorangan (PJLP). Masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, yaitu :

1. Kasatgas Pol PP Kelurahan Bidara Cina

Satpol PP kelurahan dipimpin oleh seorang kasatgas pol pp kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kasatpol PP kota/ kabupaten melalui kepala Satpol PP kecamatan serta secara operasional dikoordinasikan oleh lurah. (berdasarkan Pergub No. 285 Tahun 2016)

2. Anggota Satpol PP kelurahan

Anggota Satpol PP pada Satpol PP kelurahan merupakan pegawai Satpol PP yang dalam melaksanakan tugas ketenteraman, ketertiban serta penegakan perda dan pergub di bawah koordinasi lurah. (berdasarkan pergub No. 285 Tahun 2016, tentang organisasi dan tata kerja Satpol PP)

a. PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan. (berdasarkan Pergub No. 285 Tahun 2016, tentang organisasi dan tata kerja Satpol PP)

b. PTT (Pegawai Tidak Tetap)

Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat berdasarkan keputusan gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan (berdasarkan Pergub NO 85 Tahun 2018, tentang perubahan ketujuh atas peraturan gubernur No. 92 tahun 2012 tentang pegawai tidak tetap)

c. PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan)

Petugas pelaksana lapangan, yang mendukung SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan aneka layanan publik (berdasarkan Pergub No. 249 Tahun 2016,)

Belum terwujudnya profesionalisme seorang aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja secara professional, menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP / 75 / M.PAN / 7 / 2004 demi mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien. Hal tersebut juga berkaitan dengan pendistribusian ASN yang saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan organisasi, ketidakcocokan antara kompetensi dan jabatan yang diemban, disebabkan oleh keahlian atau keterampilan yang belum proposional, serta belum didasarkan pada beban kerja yang ada.

Penataan ASN dilakukan dengan cara menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan perundang – undangan, menganalisis kesenjangan antara

profil ASN dengan syarat jabatan, dan menentukan kategori jumlah aparatur pada suatu instansi dengan cara membandingkan anantara hasil perhitungan kebutuhan pegawai setiap jabatan dengan jumlah pegawai yang ada, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah aparatur instansi yang bersangkutan masuk kedalam kategori kurang, sesuai, atau lebih. Kemudian melakukan langkah tindak lanjut berdasarkan kategori jumlah aparatur yang diperoleh.

Informasi dari Satpol PP Provinsi DKI Jakarta saat ini belum adanya penambahan petugas Satpol PP Kelurahan Bidara Cina disebabkan karena belum adanya rencana anggaran. Keterbatasan petugas yang jumlahnya hanya 8 orang, tidak memungkinkan bisa mengawal penegakan perda yang ada di Provinsi DKI Jakarta khususnya di wilayah Kelurahan Bidara Cina.

Jumlah petugas Satpol PP Kelurahan Bidara Cina saat ini termasuk Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pol PP tingkat Kelurahan, belum ada kesesuaian beban kerja yang dilakukan dengan jumlah tenaga kerja yang melakukan tugas, ditambah adanya tugas unsur samping yaitu pengawasan penyakit masyarakat yang berkolaborasi dengan unsur samping yakni unsur Polri dan TNI.

Keberadaan petugas Satpol PP Kelurahan Bidara Cina yang tidak memiliki petugas perempuan, menyebabkan kurang optimalnya penegakan perda dan pengawasan penyakit masyarakat yang umumnya menargetkan wanita sebagai pelanggar serta sekaligus korban dalam ketertiban umum. Pada saat ini Satpol PP Provinsi DKI Jakarta masih memiliki masalah dalam bidang kepegawaian, dimana masih ada wilayah yang memiliki beban kerja yang tinggi namun tidak sepadan dengan jumlah petugasnya. Tujuan organisasi belum tercapai secara maksimal dan

penggunaan waktu kerja yang belum tepat, salah satunya disebabkan kurang terdistribusi petugas dengan komposisi pekerjaan yang belum terselesaikan.

Ketimpangan yang paling menonjol adalah ketika perda setiap tahunnya bertambah, sedangkan jumlah petugas Satpol PP Kelurahan Bidara Cina sejak tahun 2020 tidak mengalami penambahan jumlah petugas. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman umum penyusunan kebutuhan PNS yang menyatakan penataan PNS adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata.

Beban kerja yang dihadapi Satpol PP Kelurahan Bidara Cina yang penuh tantangan serta hambatan, menyebabkan anggota Satpol PP Kelurahan Bidara Cina bekerja lebih ekstra dengan kemantaban mental. Kesiapan mental sangat penting untuk para anggota, mengingat mereka selalu berhadapan dengan masyarakat. Sering mereka mengalami kendala selama dilapangan, seperti ketika menertibkan pedagang kaki lima (PKL), pengamen, manusia *silver*, pengemis, preman dll. Para pelanggar perda yang merasa tidak bersalah, melakukan perlawanan berupa adu mulut dengan petugas. Karena hal tersebut, kemungkinan besar rasa kesal dan sikap acuh tak acuh terhadap masyarakat muncul hingga mengganggu kinerja Satpol PP Kelurahan Bidara Cina. Apabila kondisi ini terus menerus dihadapi dan timbul ketidakcocokan pemikiran dan pendapat satu sama lainnya, maka akan dapat berujung pada gangguan emosional, seperti reaksi marah, cemas, depresi, lelah dan sinis. Rasa lelah

karena bekerja lebih ekstra sudah menjadi masalah tersendiri, ditambah dengan masalah lain yang mengganggu emosional individu. Jika dampak dari pekerjaan tersebut berlangsung, akan mengganggu kinerja Satpol PP serta dapat merugikan organisasi itu sendiri.

Pembagian tugas dalam sebuah organisasi sangatlah penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi hasil dari kinerja sebuah organisasi, sama halnya dengan Satpol PP Kelurahan Bidara Cina pembagian kerja, jam kerja, jam operasi lapangan sudah di tentukan agar menghasilkan kualitas pegawai dan kuantitas pegawai yang ideal. Persoalan kualitas, kuantitas dan ketersediaan jumlah petugas juga menjadi persoalan, jumlah petugas yang terbatas dan tidak seimbang dengan beban kerja masing-masing petugas sesuai tanggung jawabnya yang di gariskan struktur organisasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut akan menyebabkan tujuan organisasi belum tercapai secara optimal dan penggunaan waktu kerja yang belum tepat. Analisa beban kerja pada Satpol PP Kelurahan Bidara Cina perlu mendapatkan perhatian dengan serius karena pada prinsipnya bertujuan untuk membuat proses organisasi lebih efektif dan efisien. Dengan diterapkannya metode analisis beban kerja diharapkan dapat terjadi peningkatan hasil kerja pada Satpol PP Kelurahan Bidara Cina.

Deskripsi kerja, peta jabatan, beban kerja per jabatan, dan bobot jabatan adalah hasil evaluasi beban kerja. Faktor – faktor tersebut nantinya terkait dengan standar kompetensi, syarat jabatan, indikator kerja pegawai, nilai dan peringkat jabatan. Uraian fenomena – fenomena diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji

lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “**Analisis Beban Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Bidara Cina**”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis mengajukan rumusan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut “bagaimana analisis beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Bidara Cina?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka penulis mengajukan tujuan penelitian untuk mengetahui kebutuhan pegawai Satpol PP Kelurahan Bidara Cina.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan untuk dapat memperkaya khasanah keilmuan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (MSDMA). Serta dapat dijadikan sebuah rujukan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat meninjau kembali beban kerja Satpol PP dengan komposisi petugas Satpol PP yang ada di Kelurahan Bidara Cina.